

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara garis besar kegiatan perekonomian di Indonesia di bagi menjadi tiga kelompok badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dari ketiga kelompok badan usaha tersebut tentunya harus dikembangkan menjadi komponen – komponen yang saling mendukung dan terpadu sebagaimana yang diharapkan pemerintah, agar tercipta sistem ekonomi nasional yang kuat. Salah satunya ialah badan usaha pada bidang koperasi. Dalam pembangunan nasional, koperasi memiliki arti penting untuk kemajuan bangsa. Seperti yang tertuang di Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dalam Pasal 33 memang tidak disebutkan tentang koperasi namun, ”asas kekeluargaan” itu ialah koperasi.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian di Indonesia, disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi menjadi satu – satunya bentuk usaha yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi dan selaras dengan semangat jiwa gotong – royong Bangsa Indonesia. Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota secara khusus dan masyarakat secara umum (Wahyuning, 2013:2).

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan anggota dengan melayani kebutuhan anggota melalui kerjasama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kerjasama dalam koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang menjadi tanggungan bersama.

Menurut Sartika (2009;29) koperasi memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana yang telah di atur dalam Anggaran Dasar. Prinsip - prinsip pengelolaan koperasi tersebut menjadi keunggulan koperasi dibandingkan dengan usaha lain apabila diterapkan dengan benar.

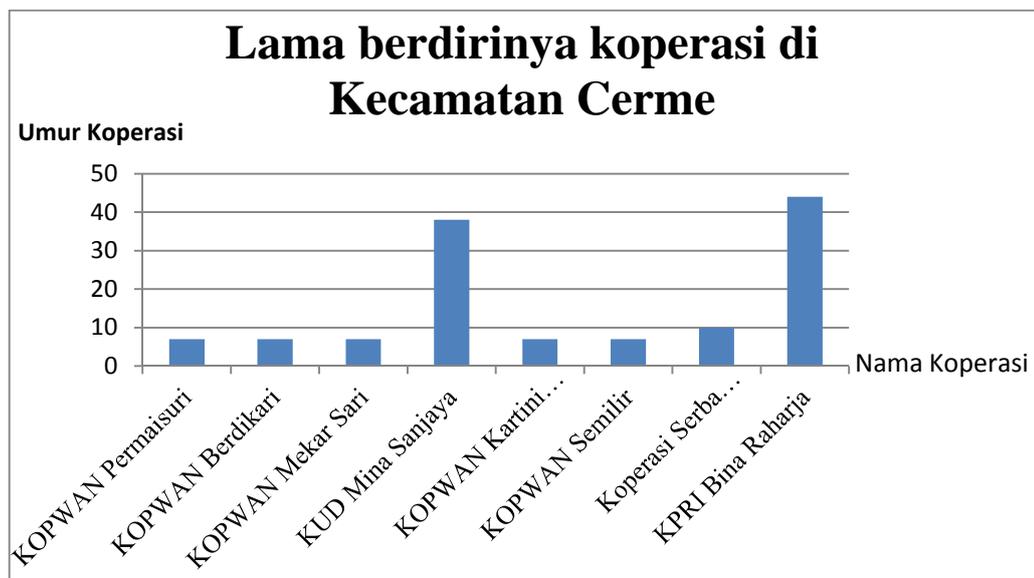
Penerapan prinsip – prinsip tersebut, diharapkan koperasi bisa terus maju dan berkembang. Perkembangan koperasi perlu diarahkan agar koperasi semakin maju, mandiri dan mengakar di masyarakat. Hardiningsih Erindani (2013;3) berpendapat bahwa untuk menjadikan koperasi semakin maju dan berkembang tidak lepas dari peran aktif anggota beserta pengurus koperasi dan diperlukan pula peningkatan kualitas koperasi pada aspek keuangan atau kinerja keuangan koperasi. Keberhasilan suatu koperasi dalam meningkatkan keuntungan bisa dilihat dari kinerja keuangan koperasi. Menurut Fahmi (2012;239) yang dimaksud dengan kinerja keuangan ialah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Koperasi dituntut untuk mampu tetap bertahan guna membiayai seluruh kegiatan operasionalnya, mengoptimalkan keuntungan dan mensinergikan seluruh sumber daya alam yang dimiliki. Agar koperasi tetap bertahan harus memiliki keuntungan atau pendapatan yang layak. Pendapatan pada koperasi biasa disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut Andjar (2007;133) adalah hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen – komponen biaya; jadi merupakan “sisa” dari semua hasil kegiatan dari menjalankan usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi menunjukkan keberhasilan koperasi dalam mengolah suatu bisnis dalam mencapai tujuannya.

Menurut Kepala Bidang Perkoperasian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Firman Abdullah mengatakan, koperasi di Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tercatat pada tahun 2015 jumlah koperasi di Gresik sebanyak 1.332 koperasi dari tahun sebelumnya yang hanya 972 koperasi (jawapos.com 02/05/2017). Koperasi tersebut terdiri dari berbagai jenis koperasi seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Wanita (KOPWAN), Koperasi karyawan dan lain – lain. Koperasi di Kabupaten Gresik terletak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satunya berada di kecamatan Cerme, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di kecamatan Cerme terdapat 9 koperasi.

Diantara koperasi di Kecamatan Cerme, KPRI Bina Raharja merupakan koperasi yang paling lama berdiri dibandingkan dengan koperasi yang lainnya, dapat dilihat pada gambar berikut ;



Sumber ; *Kementerian Koperasi dan UKM (Diolah)*

Gambar 1.1
Lama Berdiri Koperasi di Kecamatan Cerme

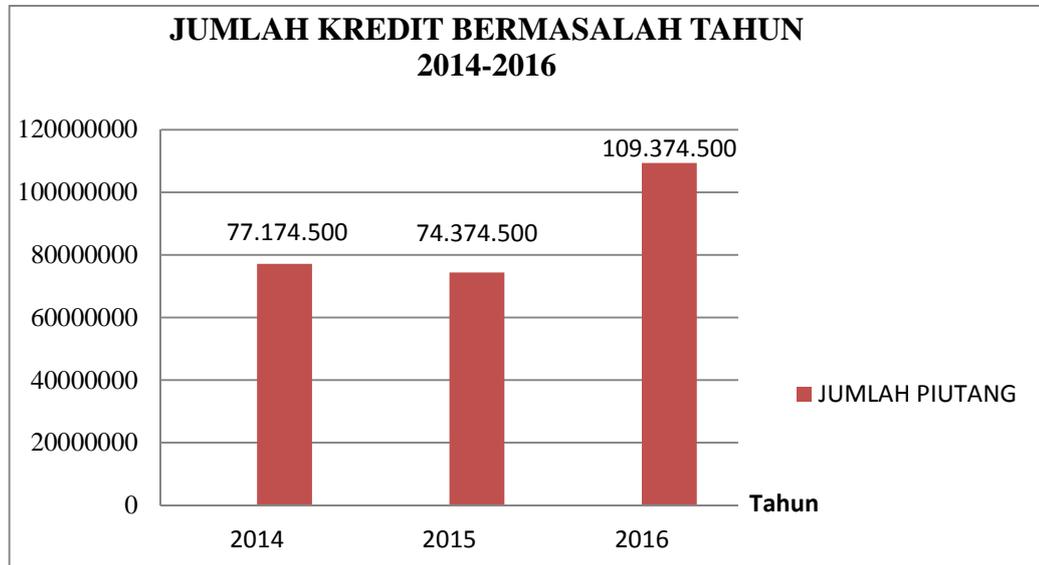
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa KPRI Bina Raharja merupakan koperasi yang paling lama beroperasi yaitu selama 44 tahun. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan salah satu jenis koperasi di Indonesia yang dibentuk oleh golongan fungsional pegawai negeri. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) merupakan salah satu jenis koperasi primer dimana para anggotanya merupakan para pegawai negeri yang berpenghasilan tetap (Aviyani, 2016;3).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “BINA RAHARJA” berdiri sejak 6 Mei 1972. Koperasi dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor ; 226 / KEP / M / V / 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. KPRI Bina Raharja memiliki bidang usaha yang bergerak pada unit simpan pinjam dan unit penjualan barang. Dari kedua bidang usaha tersebut, bidang usaha di Unit Simpan Pinjam (USP) menjadi bidang andalan dan menjadi usaha pokok di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja. Pemberian pinjaman merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh KPRI Bina Raharja dalam mengolah modal yang dimiliki dari simpanan wajib anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman.

Koperasi dalam menjalankan simpan pinjam, menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan dana untuk taraf hidup yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dalam pengembangan suatu usaha. KPRI Bina Raharja pada unit simpan pinjam hadir dengan kemudahan dalam prosedur pengajuan kredit dan suku bunga yang rendah. Meski dengan prosedur pengajuan kredit yang mudah dan bunga yang rendah masih belum menjamin akan ketepatan anggota dalam menyelesaikan pinjamannya. Masih ada beberapa anggota yang tidak mampu untuk membayar tagihan hutangnya. Hal ini menyebabkan usaha mengalami kredit bermasalah. Menurut ismail (2010;222) kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan. Dalam melaksanakan pemberian piutang, di KPRI Bina Raharja mengalami kredit

bermasalah yang jumlahnya cukup tinggi. Berikut adalah gambar jumlah kredit bermasalah KPRI Bina Raharja dari tahun 2014 – 2016, sebagai berikut ;



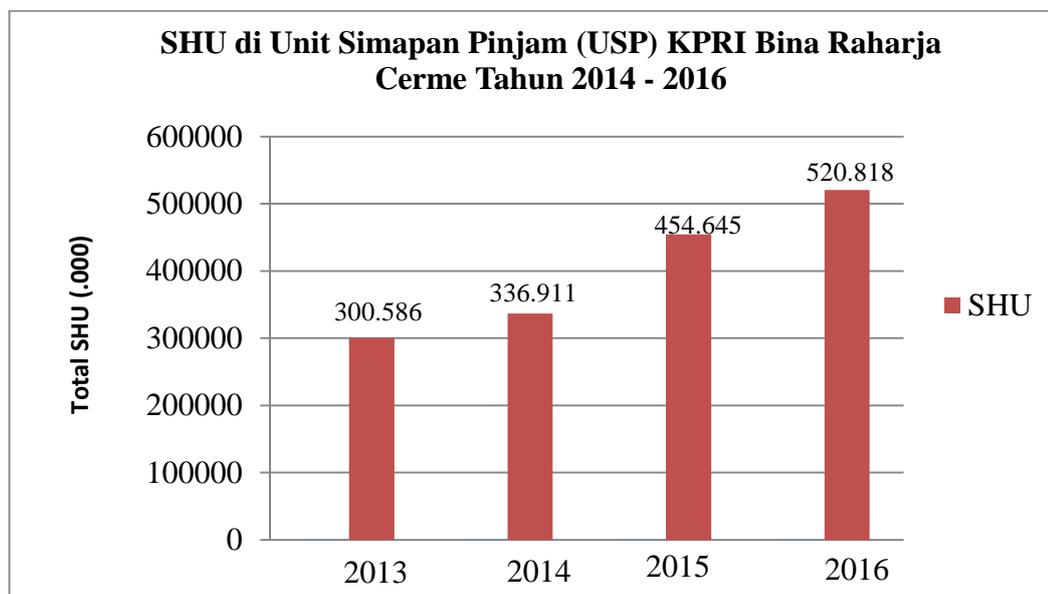
Sumber ; *Laporan keuangan KPRI “Bina Raharja” (Diolah)*

Gambar 1.2
Jumlah Piutang Tak Tertagih KPRI “Bina Raharja”

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa terdapat kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja Kecamatan Cerme pada tahun 2014 sebesar Rp 77.174.500, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 74.374.500, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 109.374.500.

Kondisi piutang yang mengalami kemacetan atau masalah dapat mempengaruhi aliran kas menjadi menurun. Menurut Sartika (2009;52) apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Diketahui di KPRI Bina Raharja kontribusi anggota mengalami kemacetan yaitu pada jumlah piutang tak tertagih

atau yang mengalami masalah tidak berimbang pada SHU yang diperoleh. Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPRI Bina Raharja diketahui mengalami peningkatan meski terjadi piutang bermasalah yang meningkat. Berikut data Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI Bina Raharja tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2016.



Sumber ; *Laporan keuangan KPRI “Bina Raharja” (Diolah)*

Gambar 1.3
Data Pertumbuhan SHU KPRI “Bina Raharja”

Dari data diatas menunjukkan peningkatan SHU di KPRI Bina Raharja selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2013 SHU di USP KPRI Bina Raharja sebesar Rp. 300.586.000, kemudian meningkat di tahun 2014 Rp. 336.911.000 dan meningkat di tahun 2015 sebesar Rp. 454.645.00, di tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 520.818.000. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah dikurangi dana cadangan koperasi, akan dibagikan kepada anggota yang sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing – masing anggota dengan koperasi. Penetapan besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada

anggota serta jumlahnya telah ditetapkan pada Rapat Anggota sesuai dengan AD/AR Koperasi. Jasa usaha yang diterima anggota sesuai dengan partisipasi modal oleh anggota kepada koperasi.

Dalam menumbuhkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pengurus koperasi memerlukan strategi yang tepat agar bisa terwujud. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana mendeskripsikan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada fenomena simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada fenomena simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap analisis kinerja keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Bina Raharja” Gresik dapat dimanfaatkan oleh :

1. Bagi KPRI “Bina Raharja”

Agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk KPRI “Bina Raharja” Gresik sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada unit simpan pinjam.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literatur dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik pembahasan yang terkait.